



LKjIP TAHUN 2024

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN BLITAR**

***Jl. Bromo No.03 Wlingi - Blitar
Telp. 0342-692819***

KATA PENGANTAR

Dengan mengucap syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Blitar Tahun 2024 dapat diselesaikan tepat pada waktu yang telah ditentukan.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) disusun sebagai wujud akuntabilitas atas pelaksanaan tugas dan fungsi yang diemban setiap instansi pemerintah, serta penggunaan anggaran yang telah diberikan. Penyusunan laporan ini berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014. Laporan ini bertujuan untuk memberikan gambaran tentang tingkat pencapaian kinerja, permasalahan yang dihadapi, dan langkah-langkah solusi yang telah diambil dalam pelaksanaan tugas, pokok, dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Sebagai alat untuk menilai akuntabilitas kinerja, laporan ini juga bertujuan untuk mengukur efektivitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh BPBD Kabupaten Blitar. Laporan ini disusun dengan mengacu pada Rencana Strategis 2021 – 2026, Rencana Kerja Tahunan 2024, Perjanjian Kinerja Tahun 2024, serta Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2024 dan perubahan-perubahannya yang telah ditetapkan, guna memastikan pelaksanaan program dan kegiatan yang terarah dan sesuai dengan sasaran yang telah ditentukan.

Melalui penyusunan LKjIP ini, diharapkan laporan ini dapat menjadi bahan evaluasi bagi pihak-pihak yang berkepentingan, khususnya dalam upaya peningkatan kinerja di masa yang akan datang. Laporan ini juga bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai penerapan prinsip-prinsip good and clean governance, yang mencakup upaya untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas di lingkungan pemerintahan, sehingga tercipta pemerintahan yang lebih efektif dan terpercaya.

Blitar, 18 Februari 2025

Kepala Pelaksana
Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Blitar



IVONG BERTTYANTO, ST, M.Si.

Pembina Utama Muda

NIP. 19730518 199901 1 001

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) BPBD Kabupaten Blitar Tahun 2024 ini merupakan bentuk pertanggungjawaban atas perjanjian kinerja BPBD yang memuat rencana, capaian, dan realisasi indikator kinerja dari sasaran strategis. Sasaran dan indikator kinerja termuat dalam Renstra BPBD Tahun 2021-2026. Untuk mencapai sasaran tersebut, ditempuh dengan melaksanakan strategi, kebijakan, program dan kegiatan seperti telah dirumuskan dalam rencana strategis.

Ringkasan kinerja BPBD yang dihasilkan pada tahun 2024 digambarkan dalam realisasi sasaran strategis yang merupakan IKU Badan penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Blitar.

Capaian kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2023 dalam mewujudkan sasaran strategis dapat digambarkan sebagai berikut:

1. Capaian Sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah
 - a. Diukur melalui indikator Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah.
 - b. Capaian indikator tersebut didukung oleh kinerja Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.
 - c. Target capaian indikator tahun 2024 adalah nilai skor 78 terealisasi 69,35. Persentase realisasi terhadap target mencapai 88,91%.
2. Capaian Sasaran Meningkatnya Kualitas Layanan Penanggulangan Bencana
 - a. Diukur melalui 3 indikator yaitu Persentase Desa/Kelurahan yang Mengadopsi dan Menerapkan desa/Kelurahan Tangguh Bencana, Persentase jiwa Terdampak bencana yang terselamatkan, serta Rata – rata kenaikan indeks pemulihan pascabencana.
 - b. Capaian indikator tersebut didukung oleh kinerja Program Penanggulangan Bencana.
 - c. Target capaian tahun 2024 :
 - Indikator Persentase Desa/Kelurahan yang Mengadopsi dan Menerapkan desa/Kelurahan Tangguh Bencana terealisasi sebesar 16,9% sesuai target
 - Indikator Persentase jiwa Terdampak bencana yang terselamatkan terealisasi 100% sesuai target, dan

- Indikator Rata – rata kenaikan indeks pemulihan pascabencana terealisasi 100% sesuai target.

Meskipun pencapaian sasaran baik, tapi dalam melaksanakan kegiatan masih terdapat hambatan/kendala yang mempengaruhi upaya pencapaian kinerja sasaran-sasaran tersebut. Evaluasi atas pencapaian kinerja dan permasalahan yang ditemui pada setiap sasaran menunjukkan beberapa tantangan yang perlu menjadi perhatian bagi BPBD ke depan, sebagai berikut:

1. Peningkatan Sumber Daya Manusia

Mengikutsertakan dalam pelatihan rutin baik di bidang teknis maupun manajerial, guna meningkatkan kapasitas sumber daya yang ada dalam menghadapi perubahan regulasi dan prosedur baru.

2. Penguatan Sistem Pengawasan dan Evaluasi

Melaksanakan sistem evaluasi yang jelas dan terjadwal untuk memberikan umpan balik terhadap kinerja perangkat daerah.

3. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM)

Pelatihan bagi petugas penanggulangan bencana di seluruh tingkat pemerintahan, termasuk relawan di desa/kelurahan, untuk meningkatkan keterampilan teknis dalam mitigasi, tanggap darurat, dan pemulihan pascabencana.

Mengadakan pelatihan kepada masyarakat untuk meningkatkan kesadaran dan keterampilan dalam penanggulangan bencana, serta memanfaatkan potensi sumber daya lokal sebagai bagian dari kesiapsiagaan bencana.

4. Peningkatan pelayanan informasi kebencanaan

Peningkatan pelayanan informasi kebencanaan baik melalui kegiatan tatap muka maupun melalui seluruh media sosial BPBD (website, Instagram, Facebook, dan grup WhatsApp) untuk menyebarkan informasi cepat dan akurat. BPBD juga perlu bekerjasama dengan BMKG dan instansi terkait lainnya untuk memperoleh data cuaca yang lebih tepat dan memberikan peringatan dini kepada masyarakat, sehingga mereka dapat mengambil langkah-langkah mitigasi dan kesiapsiagaan menghadapi bencana yang disebabkan oleh perubahan iklim.

Anggaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Blitar untuk pembiayaan seluruh kegiatannya pada tahun anggaran 2024 sebesar Rp 12.068.255.802,00 terealisasi Rp 11.709.080.010,00 atau 97,02%.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
IKHTISAR EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL.....	vi
DAFTAR GAMBAR.....	vii
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Penjelasan Umum Organisasi.....	1
B. Aspek Strategis Organisasi.....	4
C. Dasar Hukum.....	6
D. Sistematika Dokumen	7
BAB II	9
PERENCANAAN KINERJA.....	9
A. Visi dan Misi	9
B. Tujuan dan Sasaran	9
C. Indikator Kinerja Utama.....	9
D. Perjanjian Kinerja Tahun 2024.....	11
E. Perencanaan Anggaran Tahun 2024	11
BAB III	14
AKUNTABILITAS KINERJA	14
A. Pengukuran Kinerja	14
B. Capaian Kinerja Organisasi.....	15
1. Definisi Operasional Indikator Kinerja.....	15
2. Perbandingan Antara Target Dan Realisasi Kinerja Tahun 2024	16
3. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Tahun 2024 Dengan Tahun Sebelumnya	25
4. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 Dengan Target Jangka Menengah Yang Terdapat Dalam Dokumen Rencana Strategis.....	26
5. Perbandingan Realisasi Kinerja Dengan Capaian Provinsi Jawa Timur	27
6. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan.....	29
7. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	32
8. Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja	33
C. Realisasi Anggaran	37
BAB IV	38
PENUTUP.....	38

A. Kesimpulan..... 38

B. Pemecahan Masalah..... 38

C. Tindak Lanjut 39

LAMPIRAN – LAMPIRAN 40

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Data ASN Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Blitar	3
Tabel 1. 2 Pemetaan Permasalahan Pokok, Masalah dan Akar masalah.....	5
Tabel 2. 1 Indikator Kinerja Utama.....	10
Tabel 2. 2 Perjanjian Kinerja Tahun 2024.....	11
Tabel 2. 3 Rincian Anggaran pada Tahun 2024	11
Tabel 3. 1 Pengelompokan Nilai dan Predikat Kinerja	14
Tabel 3. 2 Hasil Pengukuran Kinerja Tahun 2024.....	15
Tabel 3. 3 Definisi Operasional Indikator Kinerja.....	15
Tabel 3. 4 Perbandingan Antara Target Dengan Realisasi Kinerja Tahun 2024	17
Tabel 3. 5 Rincian Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2024	17
Tabel 3. 6 Perbandingan Antara Target Dengan Realisasi Kinerja Tahun 2024	18
Tabel 3. 7 Perkembangan kinerja sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	25
Tabel 3. 8 Perkembangan kinerja sasaran Meningkatnya Kualitas Layanan Penanggulangan Bencana	26
Tabel 3. 9 Pencapaian kinerja sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah terhadap target jangka menengah Renstra.....	26
Tabel 3. 10 Pencapaian kinerja sasaran meningkatnya Meningkatnya Kualitas Layanan Penanggulangan Bencana terhadap target jangka menengah Renstra	27
Tabel 3. 11 Perbandingan Nilai Indeks Risiko Bencana (IRB) Tahun 2024 di tingkat provinsi	28
Tabel 3. 12 Perkembangan Nilai Indeks Risiko Bencana (IRB) Kabupaten Blitar	28
Tabel 3. 13 Perbandingan Nilai Indeks Kapasitas Daerah (IKD) di tingkat Provinsi.....	29
Tabel 3. 14 Perkembangan Nilai Indeks Kapasitas Daerah (IKD) Kabupaten Blitar.....	29
Tabel 3. 15 Analisis Efisiensi Sumber Daya	33
Tabel 3. 16 Realisasi anggaran dalam mendukung pencapaian sasaran	33
Tabel 3. 17 Realisasi anggaran dalam mendukung pencapaian sasaran Meningkatnya Kualitas Layanan Penanggulangan Bencana	35
Tabel 3. 18 Realisasi kinerja dan keuangan.....	37

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Struktur Organisasi BPBD Kab.Blitar	3
Gambar 3. 1 Sosialisasi kebencanaan melalui pemenuhan permintaan narasumber kebencanaan dari Kantor Pemerintahan, Satuan pendidikan, Perkantoran Swasta dan Media Radio.....	19
Gambar 3. 2 Pembentukan DESTANA KARANGREJO, SUKOSEWU, KALITENGAH, TUMPAKKEPUH dan KEBONSARI	20
Gambar 3. 3 Pembentukan FPRB dan SPAB 1 Gandusari Desa Semen Kecamatan Gandusari.....	20
Gambar 3. 4 Mitigasi Struktural pembangunan Talud	21
Gambar 3. 5 Kegiatan peningkatan Kapasitas Wanita dan Relawan dalam Membangun Keluarga Tangguh bencana di Kabupaten Blitar, diikuti peserta yang terdiri dari anggota tim penggerak PKK kecamatan se-Kabupaten Blitar, Relawan FPRB Desa/Kelurahan di Kabupaten Blitar dan Staf BPBD Kabupaten Blitar.....	22
Gambar 3. 6 Penanganan darurat bencana yang terjadi di seluruh wilayah kabupaten Blitar	23
Gambar 3. 7 Kegiatan distribusi logistik kebencanaan	24
Gambar 3. 8 Penyaluran bantuan air bersih dukungan dari BAZNAS dan MyFundAction.....	24
Gambar 3. 9 Penyaluran air bersih oleh Pj Gubernur Jawa timur didampingi oleh Pj. Bupati Blitar, Kepala Pelaksana BPBD Provinsi serta Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Blitar kepada warga terdampak kekeringan	24
Gambar 3. 10 Peresmian Jembatan Dawuhan Kecamatan Kademangan oleh Ibu Bupati Blitar, Hj. Rini Syarifah didampingi Bapak Kepala Pelaksana BPBD Kab.Blitar.....	25

BAB I

PENDAHULUAN

A. Penjelasan Umum Organisasi

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Blitar merupakan Perangkat Daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 3 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Blitar, dan terakhir disahkan dalam Peraturan Bupati Blitar Nomor 52 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Cara Kerja Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Blitar serta Peraturan Bupati Blitar Nomor 42 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Blitar Nomor 52 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Blitar. BPBD Kabupaten Blitar dipimpin oleh Kepala Badan secara rangkap (*ex-officio*) yang dijabat oleh Sekretaris Daerah dan merupakan Organisasi Perangkat Daerah yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2010 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah, BPBD Kabupaten Blitar dalam menyelenggarakan penanggulangan bencana mengemban tugas:

1. Menetapkan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi, serta rekonstruksi secara adil dan setara;
2. Menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan;
3. Menyusun, menetapkan dan menginformasikan peta rawan bencana;
4. Menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana;
5. Melaksanakan penyelenggaraan penanggulangan bencana di Kabupaten Blitar;
6. Melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Bupati setiap bulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;
7. Mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang;
8. Mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan

9. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Sementara Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Blitar antara lain :

1. Perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien;
2. Pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, dan menyeluruh.

Sedangkan berdasarkan Peraturan Bupati Blitar Nomor 52 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah, dan Peraturan Bupati Blitar Nomor 42 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Blitar Nomor 52 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Blitar, Susunan Organisasi BPBD terdiri atas Sekretariat, Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, Bidang Kedaruratan dan Logistik, Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi, Unit pelaksana Teknis Badan serta Kelompok Jabatan Fungsional. Pelaksana BPBD merupakan unsur pelaksana fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang penanggulangan bencana. Pelaksana BPBD dipimpin oleh Kepala Pelaksana Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BPBD yang dijabat secara *ex-officio* oleh Sekretaris Daerah. Susunan organisasi Pelaksana BPBD terdiri atas Sekretariat yang terdiri atas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dan Kelompok Jabatan Fungsional, Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional, Bidang Kedaruratan dan Logistik terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional, dan Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional. Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pelaksana Badan. Masing-masing bidang dipimpin oleh Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pelaksana Badan. Sub bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris BPBD.

Dalam rangka menjalankan tugas dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Blitar maka disusun struktur organisasi sebagai berikut.

B. Aspek Strategis Organisasi

Permasalahan pembangunan adalah kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan, dan kesenjangan antara apa yang ingin dicapai di masa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat. Permasalahan tersebut harus dapat diidentifikasi oleh Perangkat Daerah untuk disusun rekomendasi penanganannya. Rumusan permasalahan yang telah diidentifikasi berdasarkan data kesenjangan (*gap*) antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan, kemudian rumusan permasalahan tersebut dipetakan menjadi masalah pokok, masalah dan akar masalah. Berikut pemetaan permasalahan pokok, masalah dan akar masalah pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Blitar.

Tabel 1.2 Pemetaan Permasalahan Pokok, Masalah dan Akar masalah

No.	Permasalahan Pokok	Permasalahan	Akar Permasalahan
1	Tingginya Tingkat Risiko Bencana di Daerah	Indeks Risiko Bencana Kabupaten Blitar masih masuk dalam kategori tinggi	Peningkatan Potensi dampak dan risiko bencana akibat perubahan iklim
		Indeks Ketangguhan Daerah (IKD) Kabupaten Blitar masih di kategori Sedang	Upaya-upaya penanggulangan bencana pada tiga tahapan bencana belum memberikan manfaat optimal bagi peningkatan kapasitas daerah
2	Kurangnya literasi Masyarakat dan aparatur terkait kebencanaan	Merupakan aspek insidental/berdasarkan kejadian, bencana seringkali menjadi aspek yang kurang diperhatikan	Kurangnya kesadaran masyarakat untuk menjaga kelestarian lingkungan
			Pemahaman terkait bencana di masyarakat sebagian besar hanya pada penanganan, belum menyeluruh pada aspek pencegahan maupun pemulihan
3	Tata kelola penanggulangan bencana yang kurang profesional dan inklusif	Tata laksana (proses bisnis) penyelenggaraan penanggulangan bencana pada lintas faktor di semua tahapan (pra, saat dan pasca) belum maksimal	Legalitas unit kerja BPBD (Pusdalops) yang memberikan layanan informasi kebencanaan kepada masyarakat dan aparatur belum tersedia

			Belum terisinya jabatan fungsional dengan kompetensi teknis yang dibutuhkan untuk meningkatkan kualitas layanan kebencanaan
--	--	--	---

Sumber: BPBD Kab.Blitar, Perubahan Renstra 2021-2026

Dari pemetaan permasalahan-permasalahan dikemukakan tersebut di atas Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Blitar telah merumuskan isu-isu strategis yaitu Peningkatan Kesiapsiagaan dan mitigasi bencana serta daya dukung lingkungan melalui perubahan perilaku masyarakat dan ketersediaan sarana prasarana, dengan masih tingginya tingkat risiko bencana di Kabupaten Blitar.

BPBD sebagai Perangkat Daerah yang menyelenggarakan sub-urusan bencana memiliki kewajiban untuk memberikan pelayanan dasar kepada masyarakat/warga Kabupaten Blitar. Berdasarkan Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota pada Permendagri Nomor 101 Tahun 2018, SPM Sub-Urusan Bencana terdiri dari Pelayanan Informasi Rawan Bencana, Pelayanan Pencegahan Dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana dan Pelayanan Penyelamatan Dan Evakuasi Korban Bencana. Dengan merujuk pada isu strategis, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Blitar menitikberatkan pada kegiatan Informasi rawan bencana dan Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana. Isu peningkatan kesiapsiagaan bencana masyarakat merupakan permasalahan strategis yang harus diselesaikan dalam periode RPJMD Kabupaten Blitar.

Langkah-langkah kesiapsiagaan dibutuhkan untuk mengantisipasi bencana dan dilaksanakan melalui serangkaian pengorganisasian serta kegiatan yang tepat guna dan berdaya guna yang melibatkan sumber daya manusia dan dukungan sarana prasarana.

Informasi rawan bencana sangat penting diberikan kepada warga negara agar diketahui ancaman bencana yang dapat terjadi dan dapat membahayakan keselamatan manusia pada suatu wilayah dan waktu tertentu. Pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan terhadap bencana sangat dibutuhkan sebagai upaya untuk mengurangi dampak bencana, terutama korban jiwa manusia pada suatu wilayah dan waktu tertentu.

Selain pada isu strategis tersebut, Badan Penanggulangan Bencana tetap dan selalu meningkatkan upaya penyelamatan dan evakuasi korban bencana harus dilaksanakan sesegera mungkin dengan penetapan standar waktu minimum darurat karena keselamatan jiwa manusia sangat penting dalam

proses penanganan darurat bencana. Pada tahap pascabencana penyelenggaraan penanggulangan bencana meliputi kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana.

Dalam rangka mewujudkan pelayanan penanggulangan bencana yang efektif, BPBD Kabupaten Blitar menghadirkan serangkaian program dan kegiatan yang disusun secara komprehensif untuk mengatasi berbagai tantangan dalam penanggulangan bencana, baik pada fase pra-bencana, tanggap darurat, maupun pascabencana.

C. Dasar Hukum

Dasar hukum dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Blitar Tahun Anggaran 2024 adalah:

1. Undang-undang (UU) Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Daerah kabupaten Blitar Nomor 3 Tahun 2010 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2021-2026;
7. Peraturan Bupati Blitar Nomor 52 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
8. Peraturan Bupati Blitar Nomor 54 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Blitar;

9. Peraturan Bupati Blitar Nomor 37 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024;
10. Peraturan Bupati Blitar Nomor 42 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Blitar Nomor 52 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Blitar;
11. Peraturan Bupati Blitar Nomor 96 Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024;
12. Rencana Strategis Badan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2021-2026;
13. Rencana Strategis Perubahan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2021-2026;
14. Rencana Kerja (Renja) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2024;
15. Rencana Kerja Perubahan (Renja-P) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2024.

D. Sistematika Dokumen

Kata Pengantar

Ikhtisar Eksekutif

Daftar Isi

Daftar Tabel

Daftar Gambar

BAB I PENDAHULUAN

A. Penjelasan Umum Organisasi

B. Aspek Strategis Organisasi

C. Dasar Hukum

D. Sistematika

BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. Visi dan Misi

B. Tujuan dan Sasaran

C. Indikator Kinerja Utama

D. Perjanjian Kinerja

E. Perencanaan Anggaran

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Pengukuran Kinerja

B. Capaian Kinerja Organisasi

1. Menjelaskan definisi operasional dari setiap indikator kinerja;
2. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
3. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
4. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
5. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);
6. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;
7. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
8. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

C. Realisasi Anggaran

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

B. Pemecahan Masalah

C. Tindak Lanjut

LAMPIRAN

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Visi dan Misi

Pemerintah Kabupaten Blitar memiliki visi “Terwujudnya Kabupaten Blitar yang Mandiri dan Sejahtera berlandaskan Akhlak Mulia, Baldatun, Toyyibatun, Warobbun Ghofur”. Visi tersebut tertuang dalam dokumen RPJMD Tahun 2021-2026. Dalam dokumen perencanaan 5 tahunan tersebut termuat misi yang harus dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Misi yang berkenaan dengan tugas dan fungsi dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Blitar adalah Percepatan dan Pemerataan Pembangunan yang Adil dan Merata melalui Pengembangan Potensi Ekonomi Daerah dengan Mengedepankan Pemberdayaan Masyarakat dan Kelestarian Lingkungan.

B. Tujuan dan Sasaran

Dengan memperhatikan permasalahan dan isu strategis serta memperhatikan misi Kabupaten Blitar maka dirumuskan tujuan dan sasaran dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Blitar. Tujuan dan sasaran merupakan penjabaran / implementasi dari pernyataan misi. Dengan adanya tujuan akan memberikan arah yang lebih jelas untuk mencapai sasaran yang dituju. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Blitar menetapkan tujuan dan sasaran, yaitu:

Tujuan : Meningkatnya Daya Saing Ekonomi Inklusif, Mandiri dan Berkelanjutan

Sasaran : Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur Penunjang Aksesibilitas Perekonomian yang Berkelanjutan

C. Indikator Kinerja Utama

Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi. Penetapan IKU pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Blitar Kabupaten Blitar dapat dilihat pada Tabel 2.1 berikut.

Tabel 2. 1 Indikator Kinerja Utama

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Definisi Operasional Indikator	Sumber Data	Penanggung Jawab
1	Tujuan: Meningkatnya Kapasitas Daerah Dalam Penanggulangan Bencana	Indeks Kapasitas Daerah	Instrumen untuk mengukur kapasitas daerah dengan asumsi bahwa ancaman bencana dan kerentanan di daerah tersebut tetap.	BPBD	BPBD
2	Sasaran : Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	Ukuran kinerja yang mencerminkan efektivitas dan efisiensi penerapan akuntabilitas kinerja di setiap perangkat daerah dalam lingkup pemerintahan. Evaluasi ini dilakukan untuk menilai sejauh mana perangkat daerah melaksanakan prinsip prinsip SAKIP dalam perencanaan, pelaksanaan, pengukuran, pelaporan, dan evaluasi kinerja sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.	BPBD	Sekretariat
3	Sasaran: Meningkatnya Kualitas Layanan Penanggulangan Bencana	Persentase Desa/Kelurahan yang Mengadopsi dan Menerapkan desa/Kelurahan Tangguh Bencana	ukuran proporsi dari total Desa/kelurahan yang telah secara resmi mengimplementasikan program tangguh bencana (Destana), sesuai dengan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah atau badan terkait. Program ini mencakup kesiapsiagaan, mitigasi, penanggulangan, serta pemulihan bencana dengan melibatkan masyarakat setempat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi.	BPBD	Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan
		Persentase Jiwa Terdampak Bencana yang terselamatkan	ukuran proporsi dari total jiwa yang terdampak oleh bencana yang berhasil diselamatkan dari situasi bahaya selama fase tanggap darurat melalui tindakan evakuasi, penyelamatan, pertolongan medis, atau perlindungan yang diberikan selama bencana.	BPBD	Bidang Kedaruratan dan Logistik
		Rata-rata Kenaikan indeks pemulihan Pasca bencana	Penyelesaian/Penanganan kegiatan nonfisik pendukung pemulihan pascabencana.	BPBD	Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi

Sumber: BPBD Kab.Blitar

D. Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Untuk mendukung pencapaian visi dan misi Kabupaten Blitar Tahun 2021-2026 maka ditetapkan sasaran yang perlu dicapai dan direalisasikan pada setiap tahunnya. Berikut Perjanjian Kinerja tahun 2024 yang memuat sasaran beserta indikator dan target kinerja.

Tabel 2. 2 Perjanjian Kinerja Tahun 2024

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	78
2	Meningkatnya Kualitas Layanan Penanggulangan Bencana	Persentase Desa/ Kelurahan yang mengadopsi dan menerapkan Desa/ Kelurahan Tangguh Bencana	16,9%
3		Persentase jiwa terdampak bencana yang terselamatkan	100%
4		Rata – rata kenaikan indeks pemulihan pascabencana	100%

Sumber: BPBD Kab.Blitar, 2024

E. Perencanaan Anggaran Tahun 2024

Untuk mewujudkan sasaran dan mencapai target yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2024, maka disediakan anggaran sebesar Rp. 11,773,632,310.00. Namun untuk menyesuaikan dinamika dan situasi kondisi pencapaian target kinerja, maka anggaran yang telah tersedia dilakukan perubahan. Oleh Karena itu, alokasi anggaran tahun 2024 sebesar Rp. 12.068.255.802.00 dengan rincian sebagaimana tabel 2.3.

Tabel 2. 3 Rincian Anggaran pada Tahun 2024

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran	Anggaran Perubahan
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		
	<i>Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>		
	Sub Kegiatan penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp 2.583.294.808,00	Rp 2.477.918.300,00
	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi keuangan SKPD	Rp 17.820.000,00	Rp 19.800.000,00

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran	Anggaran Perubahan
	<i>Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>		
	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/penerangan Bangunan Kantor	Rp 4.650.345,00	Rp 4.650.345,00
	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp 208.773.415,00	Rp 186.156.807,00
	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Rp 17.022.311,00	Rp 13.286.700,00
	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Rp 24.811.348,00	Rp 25.040.198,00
	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp 242.210.000,00	Rp 562.799.000,00
	<i>Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>		
	Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor	Rp 0,00	Rp 90.479.430,00
	<i>Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan pemerintah Daerah</i>		
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp 26.632.000,00	Rp 26.630.000,00
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan kantor	Rp 14.600.000,00	Rp 14.600.000,00
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp 681.971.448,00	Rp 727.450.300,00
	<i>Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjan urusan Pemerintah Daerah</i>		
	Sub Kegiatan penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp 291.855.859,30	Rp 291.855.859,30
	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp 6.100.000,00	Rp 6.100.000,00
2	Program Penanggulangan Bencana		
	<i>Kegiatan Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/ Kota</i>		
	Sub Kegiatan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana	Rp 500.000.000,00	Rp 0,00

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran	Anggaran Perubahan
	Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)		
	<i>Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana</i>		
	Sub Kegiatan Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Rp 1.078.315.610,00	Rp 3.524.138.548,80
	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Rp 6.212.670,00	Rp 6.758.790,00
	Sub Kegiatan Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Rp 28.004.860,00	Rp 24.722.246,00
	<i>Kegiatan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban bencana</i>		
	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	Rp 15.060.000,00	Rp 15.060.000,00
	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Rp 9.000.000,00	Rp 9.000.000,00
	Penyediaan Logistik penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Rp 98.313.933,00	Rp 49.442.117,90
	Sub Kegiatan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	Rp 11.167.500,00	Rp 10.880.000,00
	<i>Kegiatan penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana</i>		
	Sub Kegiatan Koordinasi Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	Rp 6.101.622.062,00	Rp 3.981.485160,00
	Total Anggaran	Rp 11.773.632.310,00	Rp 12.068.255.802,00

Sumber: BPBD Kab.Blitir, 2024

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan Laporan Kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja. Pengukuran kinerja merupakan fondasi utama dalam menerapkan manajemen kinerja. Pengukuran indikator kinerja sasaran dilaksanakan dalam rangka menjamin adanya peningkatan akuntabilitas kinerja dengan melakukan klarifikasi *outcome* yang akan dan seharusnya dicapai untuk memudahkan terwujudnya organisasi yang akuntabel.

Pengukuran kinerja yang digunakan adalah membandingkan antara rencana kinerja (*performance plan*) yang direncanakan dan diperjanjikan dengan realisasi kinerja (*performance result*) yang telah dicapai. Dalam hal ini perbandingan tersebut dilakukan terhadap seluruh indikator kinerja sasaran sebagaimana ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2024. Terhadap terjadinya celah kinerja (*performance gap*), dilakukan analisis penyebab terjadinya celah kinerja tersebut, serta tindakan-tindakan perbaikan apa yang diperlukan untuk meningkatkan kinerja di masa mendatang.

A. Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan antara realisasi dan target yang ditetapkan. Selanjutnya dikelompokkan dalam nilai dan predikat kinerja sebagai berikut:

Tabel 3. 1 Pengelompokan Nilai dan Predikat Kinerja

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kategori
1.	$91\% \leq 100\%$	Sangat Tinggi
2.	$76\% \leq 90\%$	Tinggi
3.	$66\% \leq 75\%$	Sedang
4.	$51\% \leq 65\%$	Rendah
5.	$\leq 50\%$	Sangat Rendah

Hasil pengukuran kinerja pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Blitar Kabupaten Blitar atas Perjanjian Kinerja Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 3. 2 Hasil Pengukuran Kinerja Tahun 2024

No.	Sasaran	Rata-rata Capaian Kinerja	Predikat Kinerja
1.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	88,91%	Tinggi
2.	Meningkatnya Kualitas Layanan Penanggulangan Bencana	100%	Sangat Tinggi

Sumber: BPBD Kab.Blitar, 2024

B. Capaian Kinerja Organisasi

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja diatas maka perlu dilakukan analisis untuk mengetahui keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program/kegiatan. Selain itu analisis capaian kinerja digunakan untuk mengetahui langkah-langkah perbaikan yang perlu dilakukan sebagai masukan dalam perencanaan dan pelaksanaan program/kegiatan pada tahun 2025. Berikut analisis capaian kinerja pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2024:

1. Definisi Operasional Indikator Kinerja

Untuk mengukur keberhasilan dari seluruh sasaran perlu ditetapkan indikator dalam pelaksanaannya, Badan Penanggulangan Bencana kabupaten Blitar telah menetapkan indikator-indikator kinerja dengan definisi operasional sebagaimana didalam tabel sebagai berikut:

Tabel 3. 3 Definisi Operasional Indikator Kinerja

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Definisi Operasional	Formulasi Perhitungan
1.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	Ukuran kinerja yang mencerminkan tingkat efektivitas dan efisiensi penerapan sistem akuntabilitas kinerja di setiap perangkat daerah dalam lingkup pemerintahan. Evaluasi ini dilakukan untuk menilai sejauh mana perangkat daerah melaksanakan prinsip-prinsip SAKIP dalam perencanaan,	Komponen Penilaian meliputi Perencanaan Kinerja; Pengukuran Kinerja; Pelaporan Kinerja dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal.

			pelaksanaan, pengukuran, pelaporan, dan evaluasi kinerja sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.	
2.	Meningkatnya Kualitas Layanan Penanggulangan Bencana	Persentase Desa/Kelurahan yang mengadopsi dan menerapkan Desa/Kelurahan Tangguh Bencana	ukuran proporsi dari total Desa/kelurahan yang telah secara resmi mengimplementasikan program tangguh bencana (Destana), sesuai dengan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah atau badan terkait. Program ini mencakup kesiapsiagaan, mitigasi, penanggulangan, serta pemulihan bencana dengan melibatkan masyarakat setempat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi	$(\text{Jumlah Destana yang terbentuk}) / (\text{Jumlah seluruh desa di kawasan Rawan bencana}) \times (100\%)$
3.		Persentase Jiwa Terdampak Bencana yang terselamatkan	ukuran proporsi dari total jiwa yang terdampak oleh bencana yang berhasil diselamatkan dari situasi bahaya selama fase tanggap darurat melalui tindakan evakuasi, penyelamatan, pertolongan medis, atau perlindungan yang diberikan selama bencana.	$(\text{Jumlah jiwa Yang terselamatkan}) / (\text{Jumlah jiwa terdampak bencana}) \times (100\%)$
4.		Rata-rata Kenaikan indeks pemulihan Pasca bencana	Penyelesaian/ Penanganan kegiatan nonfisik pendukung pemulihan pascabencana.	$(\text{jumlah kegiatan nonfisik pendukung pemulihan pascabencana yang terlaksana} / \text{jumlah kegiatan nonfisik pendukung pemulihan pascabencana yang direncanakan}) \times 100\%$

Sumber: BPBD Kab. Blitar

2. Perbandingan Antara Target Dan Realisasi Kinerja Tahun 2024

Untuk mengetahui apakah sasaran strategis yang telah ditetapkan dapat dicapai dengan baik dapat dilakukan dengan melihat Perbandingan antara target dengan realisasi kinerja BPBD Kabupaten Blitar tahun 2024. Pengukuran pencapaian sasaran dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja.

b. *Sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah*

Dalam sasaran meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah dapat diperoleh nilai capaian kinerjanya sebesar 88,91%. Berikut tabel perbandingan antara target dengan realisasi kinerja tahun 2024:

Tabel 3. 4 Perbandingan Antara Target Dengan Realisasi Kinerja Tahun 2024

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	78	69,35	88,91
Capaian Kinerja					88,91

Sumber: BPBD Kab.Blitar,2024

Pencapaian sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah diukur tingkat keberhasilannya dengan indikator Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah adalah ukuran kinerja yang mencerminkan tingkat efektivitas dan efisiensi penerapan sistem akuntabilitas kinerja di setiap perangkat daerah dalam lingkup pemerintahan. Evaluasi ini dilakukan untuk menilai sejauh mana perangkat daerah melaksanakan prinsip prinsip SAKIP dalam perencanaan, pelaksanaan, pengukuran, pelaporan, dan evaluasi kinerja sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Berdasarkan tabel 3.2 diatas, indikator tersebut dapat direalisasi sebesar 88,91% yaitu dari target 78 dapat tercapai nilai 69,35 dengan rincian:

Tabel 3. 5 Rincian Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2024

No.	Komponen	Bobot	Nilai
1.	Perencanaan Kinerja	30	21,60
2.	Pengukuran Kinerja	30	19,80
3.	Pelaporan Kinerja	15	8,70
4.	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	19,25
Nilai Hasil Evaluasi		100	69,35
Predikat		B	

Sumber: LHE Inspektorat Kab.Blitar, 2024

c. *Sasaran Meningkatnya Kualitas Layanan Penanggulangan Bencana*

Dalam sasaran Meningkatnya Kualitas Layanan Penanggulangan Bencana dapat diperoleh nilai capaian kinerjanya sebesar 100%. Berikut

tabel perbandingan capaian kinerja sasaran meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah.

Tabel 3. 6 Perbandingan Antara Target Dengan Realisasi Kinerja Tahun 2024

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
1	Meningkatnya Kualitas Layanan Penanggulangan Bencana	1. Persentase Pemerintah Desa/Kelurahan yang mengadopsi dan menerapkan Desa/Kelurahan Tangguh Bencana	16,9%	16,9%	100%
		2. Persentase jiwa Terdampak bencana yang terselamatkan	100%	100%	100%
		3. Rata – rata kenaikan indeks pemulihan Pascabencana	100%	100%	100%
Capaian Kinerja					100%

Sumber: BPBD Kab.Blitir, 2024

Capaian sasaran Meningkatnya Kualitas Layanan Penanggulangan Bencana diukur tingkat keberhasilannya dengan jumlah indikator sebanyak 3 (tiga) indikator.

1) Indikator Persentase Pemerintah Desa/Kelurahan yang mengadopsi dan menerapkan Desa/Kelurahan Tangguh Bencana adalah total Desa/kelurahan yang telah secara resmi mengimplementasikan program tangguh bencana (Destana), sesuai dengan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah atau badan terkait. Program ini mencakup kesiapsiagaan, mitigasi, penanggulangan, serta pemulihan bencana dengan melibatkan masyarakat setempat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Berdasarkan tabel 3.4 diatas, indikator pertama Persentase Pemerintah Desa/Kelurahan yang mengadopsi dan menerapkan Desa/Kelurahan Tangguh Bencana dapat direalisasi sebesar 16,9% sesuai target. Indikator ini dilaksanakan melalui 2 kegiatan yaitu:

a) Pelayanan informasi bencana

Kegiatan ini awalnya direncanakan untuk penyediaan rambu kebencanaan, namun dialihkan ke kegiatan lain karena telah mendapat dukungan dari Pemerintah Provinsi berupa 70 unit rambu kebencanaan yang dipasang di beberapa wilayah rawan

bencana. Dengan adanya dukungan tersebut, kebutuhan akan rambu kebencanaan dari anggaran Kabupaten/Kota menjadi tidak mendesak. Oleh karena itu dialihkan untuk kegiatan lain yang juga penting dalam penanganan bencana. Meskipun demikian, kegiatan penyebaran informasi kebencanaan tetap dilaksanakan sesuai dengan rencana, untuk memastikan masyarakat tetap mendapatkan informasi yang diperlukan dalam menghadapi potensi bencana yaitu melalui kegiatan penyebaran informasi kebencanaan secara rutin melalui media sosial, seperti website, Instagram, facebook dan grup WhatsApp (WA) kebencanaan yang dikelola BPBD. Selain itu BPBD juga memenuhi permintaan narasumber dari instansi pemerintah, organisasi masyarakat, lembaga pendidikan, serta media radio dan televisi. Kegiatan ini memastikan informasi kebencanaan dapat dijangkau dan tersampaikan pada seluruh lapisan masyarakat, baik yang terhubung dengan internet maupun yang mengandalkan saluran komunikasi tradisional.



Gambar 3. 1 Sosialisasi kebencanaan melalui pemenuhan permintaan narasumber kebencanaan dari Kantor Pemerintahan, Satuan pendidikan, Perkantoran Swasta dan Media Radio

b) Pelayanan Pencegahan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana

Pelaksanaan kegiatan ini adalah:

- Pembentukan 2 Destana (Ds. Sukosewu Ke. Gandusari dan Ds. Karangrejo Kec. Garum) dari anggaran APBD dan 3 Destana (Ds. Kalitengah Kec. Panggungrejo, Ds.

Tumpakkepuh Kec. Bakung serta Ds. Kebonsari Kec. Kademangan) dukungan dari pemerintah provinsi,



Gambar 3. 2 Pembentukan DESTANA KARANGREJO, SUKOSEWU, KALITENGAH, TUMPAKKEPUH dan KEBONSARI

- Pembentukan SPAB (SMPN 1 Gandusari),
- Pembentukan FPRB Kabupaten Blitar,



Gambar 3. 3 Pembentukan FPRB dan SPAB 1 Gandusari Desa Semen Kecamatan Gandusari

- Penyusunan IKD Kabupaten Blitar Tahun 2024, serta
- Kegiatan mitigasi struktural yaitu :
 - Talud Penahan Jalan:

Desa Kalimanis Kecamatan Doko,

- Talud Penahan Longsor:

Dsn.Gebang Ds.Wonotirto Kec.Wonotirto, Dsn.Krajan Ds.Wonotirto Kec.Wonotirto, Ds.Bendosari Kec.Kademangan, Ds.Pakisaji Kec.Kademangan, Ds.Kebonsari Kec.Kademangan, Ds.Tepas Kec.Kesamben, Dsn.Sumberkalong Ds.Tepas Kec.Kesamben, dan Ds.Resapombo Kec.Doko.

- Talud Penahan Tanah:

Tanah Lingkungan Tawangsari Kel. Tawangsari Kec.Garum, Ds.Semen Rt.01 Rw.01 Kec.Gandusari, Ds.Mojorejo Kec.Wates, Ds.Krisik Rt.03 Rw.04 Kec.Gandusari, Ds.Serang Kec.Panggungrejo, Dsn.Tegalrejo Ds.Ampelgading Kec.Selorejo, Ds.Krisik Rt.02 Rw.04 Kec.gandusari, Ds.Sumberagung Rt.01 Rw.04 Kec.Selorejo serta Ds.Tepas Rt.02 Rw.04 Kec.Kesamben.



Gambar 3. 4 Mitigasi Struktural pembangunan Talud

- Penyediaan alat SAR yaitu Vertical Rescue, serta
- Peningkatan Kapasitas Wanita dan Relawan dalam Membangun keluarga Tangguh Bencana Kabupaten Blitar.



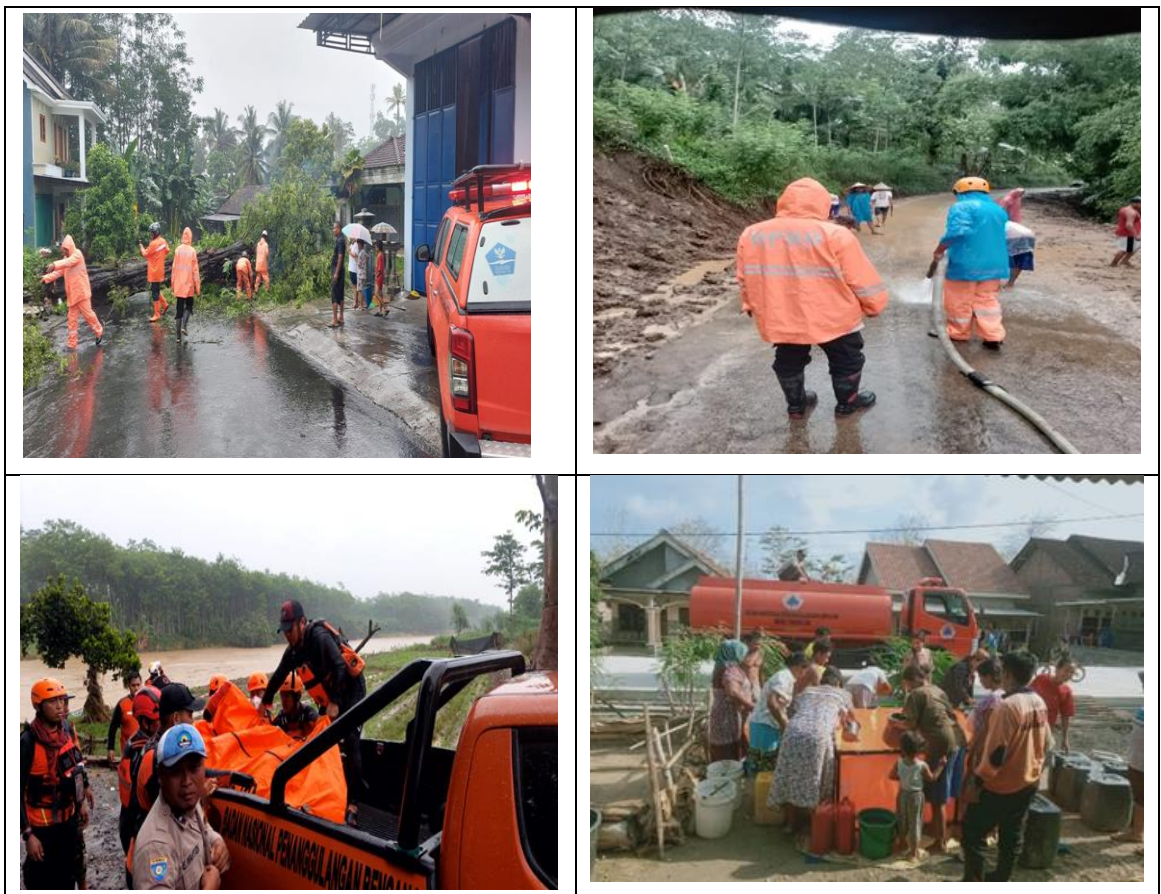
Gambar 3.5 Kegiatan peningkatan Kapasitas Wanita dan Relawan dalam Membangun Keluarga Tangguh bencana di Kabupaten Blitar, diikuti peserta yang terdiri dari anggota tim penggerak PKK kecamatan se-Kabupaten Blitar, Relawan FPRB Desa/Kelurahan di Kabupaten Blitar dan Staf BPBD Kabupaten Blitar.

Gambar 3. 5 Kegiatan peningkatan Kapasitas Wanita dan Relawan dalam Membangun Keluarga Tangguh bencana di Kabupaten Blitar, diikuti peserta yang terdiri dari anggota tim penggerak PKK kecamatan se-Kabupaten Blitar, Relawan FPRB Desa/Kelurahan di Kabupaten Blitar dan Staf BPBD Kabupaten Blitar

- 2) Indikator Persentase jiwa Terdampak bencana yang terselamatkan adalah ukuran dari total jiwa yang terdampak oleh bencana yang berhasil diselamatkan dari situasi bahaya selama fase tanggap darurat melalui tindakan evakuasi, penyelamatan, pertolongan medis, atau perlindungan yang diberikan selama bencana. Indikator Persentase Jiwa Terdampak Bencana dapat direalisasi sebesar 100% sesuai target. Indikator ini dilaksanakan melalui kegiatan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana atas 174 kejadian bencana antara lain angin kencang, tanah longsor, banjir bandang dan bencana lainnya (laka air) yang terjadi di seluruh wilayah Kabupaten Blitar yang menimbulkan sekitar 440 korban jiwa, telah dilaksanakan distribusi logistik berupa sembako serta bahan bangunan dan konstruksi stimulan darurat bencana dengan pendirian Pos Komando Penanganan Darurat Bencana Hidrometeorologi dan Penanganan Darurat Bencana Kekeringan dan Kebakaran Hutan atau Lahan di Kabupaten Blitar dan dikeluarkannya Keputusan Bupati Blitar yaitu: Keputusan Bupati Blitar Nomor B/180.05/7/409.1.2/2024/KPTS/2024 tentang Penetapan Status Keadaan Tanggap Darurat Bencana Tanah Gerak di Kabupaten Blitar. Keputusan Bupati Blitar Nomor B/180.05/8/409.1.2/KPTS/2024 tentang Penetapan Status Keadaan

Tanggap Darurat Bencana Hidrometeorologi di Kabupaten Blitar. Keputusan Bupati Blitar Nomor B/180.05/152/409.1.2/KPTS/2024 tentang Status Keadaan Tanggap Darurat Bencana Kekeringan dan kebakaran Hutan atau Lahan di Kabupaten Blitar. Serta Keputusan Bupati Blitar Nomor B/180.05/302/409.1.2/KPTS/2024 tentang Penetapan Status Siaga Darurat Bencana Hidrometeorologi di Kabupaten Blitar.

Pada tahun 2024, Kabupaten Blitar menghadapi kondisi kekeringan yang mengakibatkan krisis air bersih di beberapa wilayah. Beberapa wilayah yang terdampak kekeringan antara lain Kecamatan Wates, Binangun, Panggungrejo, Wonotirto, Sutojayan, Kademangan dan Bakung. Kekurangan air bersih ini menyebabkan kesulitan bagi lebih dari 19.420 Kepala Keluarga (KK), yang terpaksa mengandalkan bantuan air dari pemerintah dan organisasi terkait. Tercatat sampai dengan akhir tahun 2024, kurang lebih sejumlah 2.178.000 liter air bersih telah terdistribusi kepada warga yang terdampak kekeringan dengan didukung oleh BAZNAS, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Pusat serta dari Corporate Social Responsibility (CSR) MY FOUNDATION.



Gambar 3. 6 Penanganan darurat bencana yang terjadi di seluruh wilayah kabupaten Blitar



Gambar 3. 7 Kegiatan distribusi logistik kebencanaan



Gambar 3. 8 Penyaluran bantuan air bersih dukungan dari BAZNAS dan MyFundAction



Gambar 3.9 Penyaluran air bersih oleh Pj Gubernur Jawa timur didampingi oleh Pj. Bupati Blitar, Kepala Pelaksana BPBD Provinsi serta Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Blitar kepada warga terdampak kekeringan

Gambar 3. 9 Penyaluran air bersih oleh Pj Gubernur Jawa timur didampingi oleh Pj. Bupati Blitar, Kepala Pelaksana BPBD Provinsi serta Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Blitar kepada warga terdampak kekeringan

- 3) Indikator Rata – rata kenaikan indeks pemulihan Pascabencana adalah Penyelesaian/Penanganan kegiatan nonfisik pendukung pemulihan pascabencana. Berdasarkan tabel 3.4 diatas indikator Persentase jiwa Terdampak bencana tercapai 100% sesuai target. Indikator ini dilaksanakan melalui kegiatan Kegiatan koordinasi penanganan pascabencana pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Jembatan Dawuhan di Kecamatan Kademangan dukungan dari Pemerintah Pusat melalui Hibah RR dari BNPB.



Gambar 3. 10 Peresmian Jembatan Dawuhan Kecamatan Kademangan oleh Ibu Bupati Blitar, Hj. Rini Syarifah didampingi Bapak Kepala Pelaksana BPBD Kab.Blitar

3. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Tahun 2024 Dengan Tahun Sebelumnya

a. sasaran meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah

Realisasi kinerja tahun 2024 pada sasaran Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah mengalami penurunan dibandingkan tahun 2022 dan 2023. Penurunan kinerja ini lebih banyak disebabkan oleh kompleksitas prosedur dalam implementasi sakip dan keterbatasan kapasitas sumber daya yang ada. Berikut perbandingan capaian kinerja dari tahun 2022 dan 2023:

Tabel 3. 7 Perkembangan kinerja sasaran Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi		
			Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
1	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	77,68	75,72	69,35

Sumber: BPBD Kab.Blitar,2024

b. Sasaran Meningkatnya Kualitas layanan Penanggulangan bencana

Realisasi kinerja tahun 2024 pada sasaran Meningkatkan Kualitas Layanan Penanggulangan Bencana mengalami kenaikan dibandingkan

tahun 2022 dan 2023. Kenaikan kinerja ini karena banyak mendapatkan dukungan dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi. Berikut perbandingan capaian kinerja dari tahun 2022 dan 2023:

Tabel 3. 8 Perkembangan kinerja sasaran Meningkatnya Kualitas Layanan Penanggulangan Bencana

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi		
			Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
1	Meningkatnya Kualitas Layanan Penanggulangan Bencana	1. Persentase Pemerintah Desa/Kelurahan yang mengadopsi dan menerapkan Desa/Kelurahan Tangguh Bencana	13%	15%	16,9%
		2. Persentase jiwa Terdampak bencana yang terselamatkan	100%	100%	100%
		3. Rata – rata kenaikan indeks pemulihan Pascabencana	50%	50%	100%

Sumber: BPBD Kab.Blitar, 2024

4. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 Dengan Target Jangka Menengah Yang Terdapat Dalam Dokumen Rencana Strategis

Sebagai bagian dari upaya untuk mengevaluasi dan mengukur sejauh mana tujuan strategis telah tercapai, berikut disajikan perbandingan antara capaian kinerja tahun 2024 dengan target yang telah ditetapkan dalam target Rencana Strategis (Renstra) jangka menengah.

a. Sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah

Tabel 3. 9 Pencapaian kinerja sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah terhadap target jangka menengah Renstra

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Jangka Menengah Renstra	Realisasi Tahun 2024	Persentase capaian
1	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	82	69,35	84,57

Sumber: BPBD Kab.Blitar, 2024

b. Sasaran Meningkatnya Kualitas layanan Penanggulangan bencana

Tabel 3. 10 Pencapaian kinerja sasaran meningkatnya Meningkatnya Kualitas Layanan Penanggulangan Bencana terhadap target jangka menengah Renstra

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Jangka Menengah Renstra	Realisasi Tahun 2024	Persentase capaian
1	Meningkatnya Kualitas Layanan Penanggulangan Bencana	1. Persentase Pemerintah Desa/Kelurahan yang mengadopsi dan menerapkan Desa/Kelurahan Tangguh Bencana	10%	16,9%	16,9%
		2. Persentase jiwa Terdampak bencana yang terselamatkan	100%	100%	100%
		3. Rata – rata kenaikan indeks pemulihan Pascabencana	100%	100%	100%

Sumber: BPBD Kab.Blitar, 2024

5. Perbandingan Realisasi Kinerja Dengan Capaian Provinsi Jawa Timur

Badan Penanggulangan Bencana Daerah salah satu pengampu Indikator Kinerja Utama Pemerintah daerah yaitu Indeks Risiko Bencana (IRB). Indeks Risiko Bencana menyajikan informasi tingkat risiko bencana di suatu wilayah yang menilai tingkat kebencanaan berdasarkan komponen bahaya, kerentanan dan kapasitas pemerintah dalam menghadapi bencana. Risiko bencana akan mengalami penurunan atau peningkatan seiring adanya perubahan pada komponen tersebut. Oleh karena itu, program atau kegiatan yang berkaitan dengan pengurangan kerentanan atau peningkatan kapasitas dapat dilihat kontribusinya secara kuantitatif dalam bentuk penurunan Indeks Risiko Bencana. Penilaian secara berkala terhadap IRB ini dapat menjadi perangkat pemantauan dan evaluasi terhadap capaian program penanggulangan bencana pada periode tertentu. Nilai IRB dapat menjadi panduan bagi para pengambil kebijakan untuk menentukan prioritas upaya penanggulangan bencana di daerahnya masing-masing guna menurunkan Indeks Risiko Bencana sebagai upaya meningkatkan ketangguhan masyarakat.

Tabel 3. 11 Perbandingan Nilai Indeks Risiko Bencana (IRB) Tahun 2024 di tingkat provinsi

Nilai IRB		Kategori
Provinsi Jawa Timur	95,75	Sedang
Kabupaten Blitar	117,60	Sedang

Sumber: BNPB, 2024

IRB Kabupaten Blitar pada tahun 2024 mencapai nilai 117,60 atau masuk kategori Sedang. Walaupun masih diatas nilai Provinsi Jawa Timur namun setiap tahun nilai IRB Kabupaten Blitar selalu menguat, hal ini menunjukkan komitmen dan upaya Pemerintah Kabupaten Blitar dalam meningkatkan kesiapsiagaan dalam pengurangan risiko bencana, baik dari segi perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi, dalam menyiapkan Kabupaten Blitar yang tangguh bencana, diantaranya melalui kegiatan peningkatan kapasitas seluruh elemen masyarakat yang berada di wilayah rawan bencana, pembentukan Destana dan Satuan Pendidikan Aman Bencana, pemasangan rambu informasi/peringatan rawan bencana, maupun sinergitas dengan seluruh elemen masyarakat dalam penanggulangan bencana.

Tabel 3. 12 Perkembangan Nilai Indeks Risiko Bencana (IRB) Kabupaten Blitar

No.	Tahun	Nilai IRB	Klasifikasi
1	2022	134,86	Sedang
2	2023	125,76	Sedang
3	2024	117,60	Sedang

Sumber: BNPB, 2024

Keterangan :

Nilai IRB	Klasifikasi
< 13	Rendah
13 - 144	Sedang
> 144	Tinggi

Komitmen dan upaya Pemerintah Kabupaten Blitar tersebut dibuktikan dengan naiknya nilai IKD (Indeks Kapasitas Daerah) yang merupakan Indikator Tujuan dari Badan penanggulangan Bencana daerah. Nilai IKD tersebut merupakan salah satu elemen dalam penyusunan Indeks Risiko Bencana (IRB). Semakin tinggi skor Indeks Ketahanan Daerah (IKD) maka dapat menurunkan Indeks Risiko Bencana (IRB). Berikut disajikan perbandingan capaian kinerja dengan Provinsi Jawa Timur:

Tabel 3. 13 Perbandingan Nilai Indeks Kapasitas Daerah (IKD) di tingkat Provinsi

Nilai IKD		Kategori
Provinsi Jawa Timur	0,68	Sedang
Kabupaten Blitar	0,65	Sedang

Sumber: BPBD Prov Jatim, BPBD Kab.Blitar, 2024

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa nilai IKD Kabupaten Blitar berada sedikit dibawah nilai IKD Provinsi Jawa Timur. Beberapa yang perlu diperhatikan oleh Kabupaten Blitar berdasarkan hasil IKD tahun 2024 adalah peningkatan pada prioritas Efektivitas Pencegahan dan Mitigasi Bencana, prioritas Perkuatan Kesiapsiagaan dan Penanganan Darurat Bencana, serta prioritas Pengembangan sistem pemulihan bencana. Meskipun masih dibawah nilai dari Provinsi Jawa Timur namun trend nilai IKD Kabupaten Blitar semakin meningkat dari tahun ke tahun, menunjukkan selalu mengalami kenaikan pada prioritas-prioritas yang mendukung nilai IKD Kabupaten Blitar. Berikut nilai IKD Kabupaten Blitar dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

Tabel 3. 14 Perkembangan Nilai Indeks Kapasitas Daerah (IKD) Kabupaten Blitar

Tahun	Nilai IKD	Kategori
2022	0,58	Sedang
2023	0,60	Sedang
2024	0,65	Sedang

Keterangan: Nilai: (0,0-0,40 = rendah) (0,41-0,80 = sedang) (0,81-1= tinggi)

6. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan

Untuk mencapai target kinerja diatas Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Blitar menemui beberapa kendala dan hambatan yang belum dapat diatasi secara maksimal sehingga menyebabkan realisasi kinerja terealisasi belum optimal. Kendala dan hambatan tersebut antara lain:

1. Keterbatasan Sumber Daya Manusia

Masih kurangnya tenaga yang terampil dan berkompeten, sehingga mempengaruhi efektivitas pelaksanaan tugas.

2. Kurangnya Sistem Pengawasan dan Evaluasi yang Efektif

Sistem pengawasan dan evaluasi yang belum terintegrasi atau berjalan efektif dapat menghambat proses pemantauan capaian kinerja dan pelaksanaan program. Sulit mendeteksi masalah sejak dini, keterlambatan dalam pengambilan keputusan korektif, dan kurangnya akuntabilitas.

3. Terbatasnya jumlah dan kualitas sumber daya manusia terlatih dalam penanggulangan bencana di seluruh wilayah Kabupaten Blitar

Terbatasnya jumlah dan kualitas sumber daya manusia terlatih dalam penanggulangan bencana di Kabupaten Blitar menjadi salah satu tantangan utama dalam meningkatkan efektivitas penanggulangan bencana. Banyak petugas di tingkat desa/kelurahan yang belum memiliki pelatihan yang memadai dalam penanggulangan bencana, sehingga kesiapsiagaan dan respons terhadap bencana di lapangan masih terbatas. Selain itu, jumlah petugas yang terlatih juga masih kurang, terutama di daerah-daerah terpencil yang rawan bencana. Keterbatasan pelatihan dan pengembangan kapasitas ini menghambat pelaksanaan program mitigasi, tanggap darurat, dan pemulihan pascabencana yang lebih efektif dan efisien.

4. Perubahan iklim yang tidak terduga

Perubahan iklim yang tidak terduga telah mengakibatkan dampak signifikan di Kabupaten Blitar, di antaranya fenomena cuaca ekstrem dan longsor yang terjadi di beberapa wilayah. Peningkatan suhu global dan pola hujan yang tidak menentu menyebabkan intensitas hujan yang lebih tinggi, memicu terjadinya banjir bandang, tanah longsor, dan angin kencang. Wilayah-wilayah yang rawan bencana seperti daerah perbukitan dan lereng gunung sangat terpengaruh oleh perubahan iklim ini, yang memperburuk risiko kerusakan infrastruktur dan mengancam keselamatan warga. Kondisi ini menuntut kesiapsiagaan yang lebih tinggi serta upaya mitigasi yang lebih efektif untuk mengurangi dampak bencana yang semakin sering dan intens.

Untuk mengatasi kendala dan hambatan diatas Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Blitar telah melakukan beberapa upaya dalam meningkatkan kinerja yang diharapkan yaitu:

1) Peningkatan Kapasitas dan Pelatihan

Dengan mengikutsertakan sumber daya yang ada dalam pelatihan secara rutin agar dapat menguasai prosedur baru dan memahami regulasi yang berubah. Pelatihan ini tidak hanya mencakup aspek teknis, tetapi juga keterampilan manajerial dan pengelolaan beban kerja. Dengan meningkatkan kapasitas sumber daya manusia yang ada, perangkat daerah dapat mengurangi kesalahan yang disebabkan oleh kurangnya pemahaman atau keterampilan, yang dapat meningkatkan kinerja dan efisiensi.

2) Penerapan Sistem Evaluasi dan Umpan Balik yang Berkelanjutan

Melaksanakan sistem evaluasi kinerja yang terstruktur dan berkelanjutan dengan umpan balik yang jelas dan konstruktif. Proses evaluasi yang bersifat objektif dan berbasis data oleh semua pihak terkait. Dengan adanya evaluasi yang tepat waktu dapat memberikan gambaran jelas tentang capaian dan masalah yang perlu diperbaiki, memungkinkan perangkat daerah untuk mengambil langkah-langkah korektif untuk menjadi lebih baik.

3) Penguatan Kapasitas Pemerintah Desa/Kelurahan

BPBD Kabupaten Blitar telah bekerja sama dengan pemerintah provinsi untuk melaksanakan pelatihan dan pemberdayaan masyarakat di tingkat desa/kelurahan. Fokus utama adalah meningkatkan pemahaman dan keterampilan masyarakat dalam menghadapi bencana melalui program Desa/Kelurahan Tangguh Bencana.

4) Penyuluhan dan Edukasi Masyarakat

BPBD Kabupaten Blitar melaksanakan program penyuluhan kepada masyarakat mengenai pentingnya mitigasi risiko bencana melalui tatap muka maupun melalui media sosial yang ada di BPBD.

5) Peningkatan Koordinasi dan Kolaborasi Antar Instansi

BPBD Kabupaten Blitar terus memperkuat sinergi antara berbagai pihak terkait, seperti pemerintah pusat, provinsi, pemerintah desa, TNI, Polri, serta lembaga swadaya masyarakat, dalam rangka meningkatkan efektivitas tanggap darurat dan pemulihan pascabencana.

Untuk meningkatkan kinerja pada tahun berikutnya maka perlu adanya alternatif solusi sebagai rencana tindak lanjut untuk mewujudkan kinerja sasaran Meningkatkan akuntabilitas kinerja perangkat daerah

Berikut alternatif solusi sebagai rencana tindak lanjut berdasarkan analisis capaian kinerja.

1) Peningkatan Sumber Daya Manusia

Mengikutsertakan dalam pelatihan rutin baik di bidang teknis maupun manajerial, guna meningkatkan kapasitas sumber daya yang ada dalam menghadapi perubahan regulasi dan prosedur baru.

2) Penguatan Sistem Pengawasan dan Evaluasi

Melaksanakan sistem evaluasi yang jelas dan terjadwal untuk memberikan umpan balik terhadap kinerja perangkat daerah.

3) Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM)

Pelatihan bagi petugas penanggulangan bencana di seluruh tingkat pemerintahan, termasuk relawan di desa/kelurahan, untuk meningkatkan keterampilan teknis dalam mitigasi, tanggap darurat, dan pemulihan pascabencana.

Mengadakan pelatihan kepada masyarakat untuk meningkatkan kesadaran dan keterampilan dalam penanggulangan bencana, serta memanfaatkan potensi sumber daya lokal sebagai bagian dari kesiapsiagaan bencana.

4) Peningkatan pelayanan informasi kebencanaan

Peningkatan pelayanan informasi kebencanaan baik melalui kegiatan tatap muka maupun melalui seluruh media sosial BPBD (website, Instagram, Facebook, dan grup WhatsApp) untuk menyebarkan informasi cepat dan akurat. BPBD juga perlu bekerjasama dengan BMKG dan instansi terkait lainnya untuk memperoleh data cuaca yang lebih tepat dan memberikan peringatan dini kepada masyarakat, sehingga mereka dapat mengambil langkah-langkah mitigasi dan kesiapsiagaan menghadapi bencana yang disebabkan oleh perubahan iklim

7. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Pengukuran efisiensi dilakukan dengan menggunakan perbandingan antara hasil capaian kinerja yang dibandingkan dengan capaian anggaran yang terealisasi pada tahun yang sama. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Blitar 2 (dua) Program dengan 9 (sembilan) Kegiatan dan 22 (dua puluh dua) Sub Kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 12.068.255.802,00 dan dapat direalisasikan sebesar Rp. 11.709.080.010,00 (97,02%), dan analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya dapat diukur dan dideskripsikan pada tabel di bawah ini :

Tabel 3. 15 Analisis Efisiensi Sumber Daya

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2024	Realisasi 2024	Capaian	Anggaran 2024	Realisasi Anggaran 2024	Capaian	Efisiensi
Meningkatnya Akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	78	69,35	88,91	4.446.768.939,30	4.179.759.937,00	94,00	(5,09)
Meningkatnya Kualitas layanan Penanggulangan bencana	Persentase Pemerintah Desa/Kelurahan yang mengadopsi dan menerapkan Desa/ Kelurahan Tangguh Bencana	16,9%	16,9%	100%	3.555.619.584,80	3.492.811.000,00	98,23	1,77
	Persentase jiwa Terdampak bencana yang terselamatkan	100%	100%	100%	84.382.117,90	71.288.383,00	84,48	15,52
	Rata – rata kenaikan indeks pemulihan Pascabencana	100%	100%	100%	3.981.485.160,00	3.965.220.690,00	99,59	0,41

Sumber: BPBD Kab.Blitar, 2024

8. Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Program/ kegiatan yang memiliki kontribusi terhadap keberhasilan maupun kegagalan pencapaian Target kinerja disajikan pada tabel dibawah ini:

a. Sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah

Realisasi kinerja didukung oleh penggunaan sumber daya termasuk anggaran. Jumlah alokasi anggaran pada program/kegiatan yang digunakan untuk mewujudkan sasaran Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah adalah sebesar Rp. 4.446.768.939,30 dengan realisasi sebesar Rp. 4.179.759.937,00 Berikut rincian realisasi anggaran dalam mendukung pencapaian sasaran Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah.

Tabel 3. 16 Realisasi anggaran dalam mendukung pencapaian sasaran

No.	Sasaran	Capaian Kinerja	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran		
				Alokasi	Realisasi	%
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	88,91%	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota			
			Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat daerah			
			Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.477.918.300,00	2.288.653.251,00	92,36
			Sub Kegiatan Penataan dan Pengujian/Verifikasi keuangan SKPD	19.800.000,00	19.800.000,00	100,00

No.	Sasaran	Capaian Kinerja	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran		
				Alokasi	Realisasi	%
			Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah			
			Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.650.345,00	4.490.000,00	96,55
			Sub kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	186.156.807,00	183.768.988,00	98,72
			Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	13.286.700,00	12.476.500,00	93,90
			Sub kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggadaan	25.040.198,00	11.286.200,00	45,07
			Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	562.799.000,00	544.432.903,00	96,74
			Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
			Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	90.479.430,00	89.000.000,00	98,36
			Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
			Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	26.632.000,00	22.577.395,00	84,78
			Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	14.600.000,00	14.552.600,00	99,68
			Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	727.450.300,00	719.896.600,00	98,96
			Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintah Daerah			
			Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas	291.855.859,30	262.750.500,00	90,03

No.	Sasaran	Capaian Kinerja	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran		
				Alokasi	Realisasi	%
			Operasional atau Lapangan			
			Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	6.100.000,00	6.075.000,00	99,59
			Realisasi Anggaran	4.446.768.939,30	4.179.759.937,00	94,00

Sumber: BPBD Kab.Blitar, 2024

Berdasarkan capaian kinerja dan realisasi anggaran program dan kegiatan diatas maka dapat diketahui efisiensi penggunaan sumber daya dalam mencapai sasaran Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah Capaian realisasi kinerja diperoleh sebesar 88,91% sedangkan realisasi anggaran diperoleh sebesar 94,00%.

b. Sasaran Meningkatnya Kualitas layanan Penanggulangan bencana

Jumlah alokasi anggaran pada program/kegiatan yang digunakan untuk mewujudkan sasaran Meningkatnya Kualitas Layanan Penanggulangan Bencana adalah sebesar Rp. 7.621.486.862,70 dengan realisasi sebesar Rp. 7.529.320.073,00. Berikut rincian realisasi anggaran dalam mendukung pencapaian sasaran Meningkatnya Kualitas Layanan Penanggulangan Bencana.

Tabel 3. 17 Realisasi anggaran dalam mendukung pencapaian sasaran Meningkatnya Kualitas Layanan Penanggulangan Bencana

No.	Sasaran	Capaian Kinerja	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran		
				Alokasi	Realisasi	%
1	Meningkatnya Kualitas Layanan Penanggulangan Bencana	100%	Program Penanggulangan Bencana			
			Kegiatan Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota			
			Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/ Kota (Per Jenis Bencana)	0	0	0
			Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana			
			Sub Kegiatan Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	3.524.138.548,80	3.462.711.000,00	98,26

No.	Sasaran	Capaian Kinerja	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran		
				Alokasi	Realisasi	%
			Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	6.758.790,00	6.630.000,00	98,09
			Sub Kegiatan Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	24.722.246,00	23.470.000,00	94,93
			Kegiatan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana			
			Sub Kegiatan Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	15.060.000,00	11.685.000,00	77,59
			Sub Kegiatan Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	9.000.000,00	7.360.000,00	81,78
			Sub Kegiatan Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	49.442.117,90	41.363.383,00	83,66
			Sub Kegiatan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	10.880.000,00	10.880.000,00	100,00
			Kegiatan Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana			
			Sub Kegiatan Koordinasi penanganan Pasca bencana Kabupaten/Kota	3.981.485.160,00	3.965.220.690,00	99,59
			Realisasi Anggaran	7.621.486.862,70	7.529.320.073,00	98,79

Sumber: BPBD Kab.Blitar, 2024

Berdasarkan capaian kinerja dan realisasi anggaran program dan kegiatan diatas maka dapat diketahui efisiensi penggunaan sumber daya dalam mencapai sasaran Meningkatkan Kualitas Layanan Penanggulangan Bencana, capaian realisasi kinerja diperoleh sebesar 100% sedangkan realisasi anggaran diperoleh sebesar 98,79%.

C. Realisasi Anggaran

Laporan pelaksanaan anggaran Badan penanggulangan Bencana daerah Kabupaten Blitar untuk tahun anggaran 2024 berdasarkan realisasi kinerja dan keuangan yaitu sebagai berikut.

Tabel 3. 18 Realisasi kinerja dan keuangan

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
			Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	78	69,35	88,91	4.446.768.939,30	4.179.759.937,00	94,00
2	Meningkatnya Kualitas Layanan Penanggulangan Bencana	Persentase Pemerintah Desa/Kelurahan yang mengadopsi dan menerapkan Desa/Keluraha Tangguh Bencana	16,9	16,9	100	3.555.619.584,80	3.492.811.000	98,23.
		Persentase jiwa Terdampak bencana yang terselamatkan	100	100	100	84.382.117,90	71.288.383	84,48
		Rata – rata kenaikan indeks pemulihan Pascabencana	100	100	100	3.981.485.160	3.965.220.690	99,59

Sumber: BPBD Kab.Blitar, 2024

Berdasarkan data yang disajikan :

1. Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah

Evaluasi implementasi SAKIP perangkat daerah mencapai nilai 69,35, dengan pencapaian 88,91% dari target kinerja yang telah ditetapkan. Efisiensi anggaran tercatat baik, dengan realisasi 94% dari target anggaran. Meskipun ada kekurangan dalam pencapaian kinerja, efisiensi anggaran menunjukkan penggunaan yang optimal.

2. Meningkatkan Kualitas Layanan Penanggulangan Bencana

Menunjukkan pencapaian yang sangat baik, dengan indikator Desa/Kelurahan Tangguh Bencana, Jiwa Terdampak yang Terselamatkan, dan Indeks Pemulihan Pascabencana masing-masing mencapai 100%. Meski realisasi anggaran pada beberapa indikator sedikit lebih rendah dari target yang ditetapkan namun Efisiensi anggaran untuk hampir mencapai target, dengan realisasi anggaran sekitar 84% hingga 99%.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pencapaian kinerja yang telah dikemukakan pada Bab sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa pencapaian kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Blitar untuk tahun 2024 yaitu Sasaran Meningkatnya Kualitas Layanan Penanggulangan Bencana dengan kategori sangat tinggi, Sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah dengan kategori tinggi. Namun begitu masih diperlukan upaya perbaikan/penyempurnaan sehingga pencapaian sasaran pada tahun berikutnya dapat optimal.

Untuk sasaran yang dikategorikan belum berhasil, kendala yang dihadapi antara lain:

1. Keterbatasan Sumber Daya Manusia

Masih kurangnya tenaga yang terampil dan berkompeten, sehingga mempengaruhi efektivitas pelaksanaan tugas.

2. Kurangnya Sistem Pengawasan dan Evaluasi yang Efektif

Sistem pengawasan dan evaluasi yang belum terintegrasi atau berjalan efektif dapat menghambat proses pemantauan capaian kinerja dan pelaksanaan program. Sulit mendeteksi masalah sejak dini, keterlambatan dalam pengambilan keputusan korektif, dan kurangnya akuntabilitas.

B. Pemecahan Masalah

Untuk mengatasi kendala yang telah diuraikan diatas, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Blitar telah melakukan beberapa cara pemecahan masalah, antara lain:

1. Peningkatan Kapasitas dan Pelatihan

Dengan mengikutsertakan sumber daya yang ada dalam pelatihan secara rutin agar dapat menguasai prosedur baru dan memahami regulasi yang berubah. Pelatihan ini tidak hanya mencakup aspek teknis, tetapi juga keterampilan manajerial dan pengelolaan beban kerja. Dengan meningkatkan kapasitas sumber daya manusia yang ada, perangkat daerah dapat mengurangi kesalahan yang disebabkan oleh kurangnya pemahaman atau keterampilan, yang dapat meningkatkan kinerja dan efisiensi.

2. Penerapan Sistem Evaluasi dan Umpan Balik yang Berkelanjutan
Melaksanakan sistem evaluasi kinerja yang terstruktur dan berkelanjutan dengan umpan balik yang jelas dan konstruktif. Proses evaluasi yang bersifat objektif dan berbasis data oleh semua pihak terkait. Dengan adanya evaluasi yang tepat waktu dapat memberikan gambaran jelas tentang capaian dan masalah yang perlu diperbaiki, memungkinkan perangkat daerah untuk mengambil langkah-langkah korektif untuk menjadi lebih baik.

C. Tindak Lanjut

Langkah-langkah sebagai rencana tindak lanjut dalam rangka meningkatkan capaian kinerja pada tahun berikutnya, adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan Sumber Daya Manusia
Mengikutsertakan dalam pelatihan rutin baik di bidang teknis maupun manajerial, guna meningkatkan kapasitas sumber daya yang ada dalam menghadapi perubahan regulasi dan prosedur baru.
2. Penguatan Sistem Pengawasan dan Evaluasi
Melaksanakan sistem evaluasi yang jelas dan terjadwal untuk memberikan umpan balik terhadap kinerja perangkat daerah.

LAMPIRAN – LAMPIRAN

TERIMAHAH POHON KINERJA KEPADA KOMPONEN PERENCANAAN DAN KINERJA JABATAN (CASCADING I)

BADAN PENANGGUANGAN BENCANA DAERAH

KABUPATEN BLITAR

LEVEL
KEGIATAN

KINERJA
JABATAN

Kinerja Strategis Daerah	Meningkatkan Kualitas Layanan Infrastruktur dan Tets Ruang yang Berwawasan Lingkungan	PK KEPALA DAERAH	Tujuan RPJMD Indikator Tujuan RPJMD
	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLU)		
Kinerja Strategis Daerah	Meningkatkan Kapasitas Ketangguhan Terhadap Bencana	PK KEPALA OPD	Sasaran RPJMD Indikator Sasaran RPJMD
	Indeks Resiko Bencana		
Kinerja Strategis Bidang Urusan	Meningkatnya Kapasitas Daerah Dalam Penanggulangan Bencana di wilayah Kabupaten Blitar	PK KEPALA OPD	Tujuan PD Indikator Tujuan PD (RENSTRA)
	Indeks Kapasitas Daerah		
Kinerja Strategis Bidang Urusan	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	PK ESEL III	Sasaran PD Indikator Sasaran PD
	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah		
Kinerja Manajerial	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	PK ESEL IV	Program PD Indikator Program PD
	Persentase Pemenuhan Layanan Masyarakat		
Kinerja Manajerial	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	PK ESEL IV	Kegiatan PD
	Pertemuan dokumen Perencanaan, penganggaran, pengendalian dan pelaksanaan capaian kinerja yang dikerjakan tepat waktu		
Kinerja Operasional	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	PK JF	Sub kegiatan
	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		
Kinerja Operasional	Administrasi Umum Perangkat Daerah	PK JF	Indikator Kegiatan PD
	Persentase kecukupan layanan administratif umum pemerintahan		
Kinerja Operasional	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	PK JF	Sub kegiatan
	Persentase kecukupan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		
Kinerja Operasional	Administrasi Umum Perangkat Daerah	PK JF	Indikator Sub kegiatan
	Persentase kecukupan layanan administratif umum pemerintahan		

KEPALA PELAKSANA BPBD
KABUPATEN BLITAR



IVONG BERTYANTO, S.T., M.Si.

Pembina Utama Muda

NIP. 19730518 199901 1 001

**TERJEMAHAN POHON KINERJA KEPADA KOMPONEN PERENCANAAN DAN KINERJA JABATAN (CASCADING II)
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN BLITAR**

KINERJA
JABATAN

LEVEL KEGIATAN

Kinerja Strategis Daerah	Meningkatkan Kualitas Layanan Infrastruktur dan Tata Ruang yang Berwawasan Lingkungan	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI)	Meningkatkan Kapasitas Ketangguhan Terhadap Bencana		Indeks Resiko Bencana	Tujuan RPJMD Indikator Tujuan RPJMD	PK KEPALA DAERAH	
	Kinerja Strategis Daerah	Meningkatkan Kapasitas Daerah Dalam Penanggulangan Bencana di wilayah Kabupaten Blitar	Meningkatkan Kapasitas Ketangguhan Terhadap Bencana		Indeks Resiko Bencana	Sasaran RPJMD Indikator Sasaran RPJMD	PK KEPALA DAERAH	
Kinerja Strategis Bidang Urusan	Meningkatkan Kapasitas Daerah Dalam Penanggulangan Bencana di wilayah Kabupaten Blitar	Indeks Kapasitas Daerah	Meningkatkan kualitas layanan penanggulangan bencana		Persentase jiwa Terdampak bencana yang terselamatkan	Tujuan PD (RENSTRA) Indikator Tujuan PD (RENSTRA)	PK KEPALA OPD	
	Kinerja Strategis Bidang Urusan	Persentase Pemerintah Desa/ Kelurahan yang mengadopsi dan menerapkan Desa/ Kelurahan Tangguh Bencana	Meningkatkan kualitas layanan penanggulangan bencana		Persentase jiwa Terdampak bencana yang terselamatkan	Sasaran PD Indikator Sasaran PD	PK KEPALA OPD	
Kinerja Manajerial	Program Penanggulangan bencana		Program Penanggulangan bencana		Persentase warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Program PD	PK ESEL. III	
	Persentase warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Persentase warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana		Persentase penanggulangan bencana yang dilaksanakan sesuai SOP	Indikator Program PD	PK ESEL. III	
Kinerja Manajerial	Pelayanan informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana		Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Kegiatan PD	PK ESLIV	
	Persentase Jumlah desa/kelurahan yang mendapatkan informasi rawan bencana	Persentase desa/ kelurahan di kawasan risiko tinggi yang mendapatkan layanan pencegahan dan kesiapsiagaan	Persentase jumlah korban yang terselamatkan dari dampak kejadian bencana		Persentase penanggulangan bencana yang dilaksanakan sesuai SOP	Indikator Kegiatan PD	PK ESLIV	
Kinerja Operasional	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)	Penguatan Kapasitas Kawasannya dalam Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Kabupaten/Kota	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	Sub kegiatan	PK JF	
	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya selama 1 (satu) tahun	Jumlah Kawasannya yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana	Jumlah laporan layanan pusat pengendalian operasi (pusdalops) pelayanan yang sah dan legal sesuai dengan jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya	Jumlah Dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat			Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana
Kinerja Operasional	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya selama 1 (satu) tahun	Jumlah Kawasannya yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana	Jumlah laporan layanan pusat pengendalian operasi (pusdalops) pelayanan yang sah dan legal sesuai dengan jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya	Jumlah Dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Aktivasi Sistem Penanganan Darurat Bencana	Jumlah penyelesaian Kegiatan pascabencana di semua sektor sesuai berdasarkan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kabupaten/Kota yang diligalkan	Indikator Sub kegiatan
	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya selama 1 (satu) tahun	Jumlah Kawasannya yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana	Jumlah laporan layanan pusat pengendalian operasi (pusdalops) pelayanan yang sah dan legal sesuai dengan jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya	Jumlah Dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Aktivasi Sistem Penanganan Darurat Bencana	Jumlah penyelesaian Kegiatan pascabencana di semua sektor sesuai berdasarkan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kabupaten/Kota yang diligalkan	



**KEPALA PELAKSANA BPBD
KABUPATEN BLITAR**

IWONG BERTYANTO, S.T., M.Si.
Pembinia Utama Muda
NIP. 19730518 199901 1 001

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA ESELON II



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN BLITAR**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : IVONG BERTTYANTO, S.T., M.Si.
Jabatan : Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Blitar

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Hj. RINI SYARIFAH
Jabatan : Bupati Blitar



selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Blitar, 31 Januari 2024

Pihak Kedua,
BUPATI BLITAR

Hj. RINI SYARIFAH

Pihak Pertama
KEPALA PELAKSANA BPBD
KABUPATEN BLITAR


IVONG BERTTYANTO, S.T., M.Si.
Pembina Tingkat I
NIP. 19730518 199901 1 001

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN BLITAR**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	78
2	Meningkatnya Kualitas Layanan Penanggulangan Bencana	Persentase Desa/ Kelurahan yang mengadopsi dan menerapkan Desa/ Kelurahan Tangguh Bencana	16,9 %
		Persentase jiwa terdampak bencana yang terselamatkan	100 %
		Rata - rata kenaikan indeks pemulihan pascabencana	100 %

No	Program	Anggaran	Keterangan
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 3,925,935,675.00	APBD
2	Program Penanggulangan Bencana	Rp. 7,847,696,635.00	
JUMLAH		Rp. 11,773,632,310.00	

Blitar, 31 Januari 2024


 BUPATI BLITAR
Hj. RINI SYARIFAH


 KEPALA PELAKSANA BPBD
 KABUPATEN BLITAR
IVONG BERTTYANTO, S.T, M.Si.
 Pembina Tingkat I
 NIP. 19730518 199901 1 001



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : IVONG BERTTYANTO, S.T., M.Si.
Jabatan : Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Blitar

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : JUMADI
Jabatan : Pjs. Bupati Blitar

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Blitar, 31 Oktober 2024

Pihak Kedua,
Pjs. BUPATI BLITAR



JUMADI

Pihak Pertama,
KEPALA PELAKSANA BPBD
KABUPATEN BLITAR



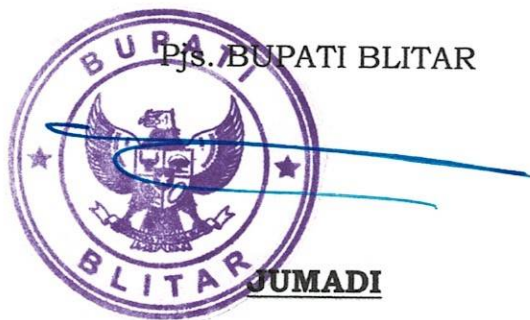
IVONG BERTTYANTO, S.T., M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19730518 199901 1 001

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN BLITAR**

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	78
2	Meningkatnya Kualitas Layanan Penanggulangan Bencana	Persentase Desa/ Kelurahan yang mengadopsi dan menerapkan Desa/ Kelurahan Tangguh Bencana	16,9 %
		Persentase jiwa terdampak bencana yang terselamatkan	100 %
		Rata - rata kenaikan indeks pemulihan pascabencana	100 %

	Program	Anggaran	Keterangan
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 4.446.768.939.30	APBD
2	Program Penanggulangan Bencana	Rp. 7.621.486.862.70	APBD dan APBN
	JUMLAH	Rp. <u>12.068.255.802.00</u>	

Blitar, 31 Oktober 2024





PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Jln. Bromo No. 03 Babadan Wlingi Blitar Telp. (0342) 692819
email: bpbd.blitarkab@yahoo.co.id / website : bpbd.blitarkab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA PELAKSANA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
NOMOR : T/180.06/12.1/409.8.1/KPTS/2024

TENTANG
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
DI LINGKUNGAN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN BLITAR
TAHUN 2024-2026

KEPALA PELAKSANA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH,

Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2), Peraturan Bupati Blitar Nomor 17 Tahun 2022 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Blitar, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Blitar;

b. bahwa penetapan Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf a, perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Blitar.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

- 2730);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Pasal 176 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
 6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
 7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
 8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara, Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 03 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan

Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Blitar;

11. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 02 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Blitar Tahun 2021-2026;
12. Peraturan Bupati Blitar Nomor 54 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Blitar;
13. Peraturan Bupati Blitar Nomor 17 Tahun 2022 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Blitar Tahun 2021-2016;
14. Peraturan Bupati Blitar Nomor 52 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas, dan Fungsi serta Tata Kerja Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Blitar.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN BLITAR TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAHTAHUN 2024-2026
- KESATU : Indikator Kinerja Utama di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Blitar, dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Blitar dalam menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis (Renstra) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2021-2026.
- KETIGA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, disusun dengan mengacu kepada Indikator Kinerja

Utama Pemerintah Kabupaten Blitar dan ditetapkan dalam bentuk Keputusan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan bencana Daerah Kabupaten Blitar.

- KEEMPAT : Akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Blitar
pada tanggal : 21 Mei 2024

KEPALA PELAKSANA BADAN
PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH,



IVONG BERTTYANTO, ST,MSi
Pembina Utama Muda
NIP. 197305181999011001

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA PELAKSANA
 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
 NOMOR : T/180.06/12.1/409.8.1/KPTS/2024
 TENTANG
 PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
 DI LINGKUNGAN BADAN PENANGGULANGAN
 BENCANA DAERAH KABUPATEN BLITAR
 TAHUN 2024-2026

INDIKATOR KINERJA UTAMA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN BLITAR
 TAHUN 2024-2026

NO.	TUJUAN DAN SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL	PENJELASAN (FORMULASI PERHITUNGAN)	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.	Meningkatnya Kapasitas Daerah Dalam Penanggulangan Bencana	Indeks Kapasitas Daerah	Instrumen untuk mengukur kapasitas daerah dengan asumsi bahwa ancaman bencana dan kerentanan di daerah tersebut tetap.	Tools IKD 71 indikator yang terbagi dalam 7 prioritas	BPBD	BPBD

NO.	TUJUAN DAN SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL	PENJELASAN (FORMULASI PERHITUNGAN)	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
2.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	Ukuran kinerja yang mencerminkan tingkat efektivitas dan efisiensi penerapan sistem akuntabilitas kinerja di setiap perangkat daerah dalam lingkup pemerintahan. Evaluasi ini dilakukan untuk menilai sejauh mana perangkat daerah melaksanakan prinsip-prinsip SAKIP dalam perencanaan, pelaksanaan, pengukuran, pelaporan, dan evaluasi kinerja sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.	Komponen Penilaian meliputi Perencanaan Kinerja; Pengukuran Kinerja; Pelaporan Kinerja dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal.	BPBD	Sekretariat

NO.	TUJUAN DAN SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL	PENJELASAN (FORMULASI PERHITUNGAN)	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
3.	Meningkatnya Kualitas Layanan Penanggulangan Bencana	Persentase Desa/Kelurahan yang Mengadopsi dan Menerapkan desa/Kelurahan Tangguh Bencana	ukuran proporsi dari total Desa/kelurahan yang telah secara resmi mengimplementasikan program tangguh bencana (Destana), sesuai dengan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah atau badan terkait. Program ini mencakup kesiapsiagaan, mitigasi, penanggulangan, serta pemulihan bencana dengan melibatkan masyarakat setempat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi.	(Jumlah Destana yang terbentuk) / (Jumlah seluruh desa di kawasan rawan bencana) x (100%)	BPBD	Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan
		Persentase Jiwa Terdampak Bencana yang terselamatkan	ukuran proporsi dari total jiwa yang terdampak oleh bencana yang berhasil diselamatkan dari situasi bahaya selama fase tanggap darurat melalui tindakan evakuasi, penyelamatan, pertolongan medis, atau perlindungan yang diberikan selama bencana.	(Jumlah jiwa yang terselamatkan) / (Jumlah jiwa terdampak bencana) x (100%)		Bidang Kedaruratan dan Logistik

NO.	TUJUAN DAN SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL	PENJELASAN (FORMULASI PERHITUNGAN)	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		Rata-rata Kenaikan indeks pemulihan Pasca bencana	Penyelesaian/Penanganan kegiatan nonfisik pendukung pemulihan pascabencana.	(jumlah kegiatan nonfisik pendukung pemulihan pascabencana yang terlaksana/jumlah kegiatan nonfisik pendukung pemulihan pascabencana yang direncanakan) x 100%		Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi

Ditetapkan di : Blitar
pada tanggal : 21 Mei 2024

KEPALA PELAKSANA BADAN
PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH,



IVONG BERTTYANTO, ST,MSi
Pembina Utama Muda
NIP. 197305181999011001

RENCANA AKSI TAHUN 2024
BADAN PENANGGULANGAN DAERAH (BPBD) KABUPATEN BLITAR

No.	Tujuan	Sasaran	Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Anggaran	Target Pelaksanaan Peristiwa				Kegiatan yang dilaksanakan	Penanggung jawab
							I	II	III	IV		
1	Meningkatnya Kapasitas Daerah dalam Penanggulangan Bencana			Indeks Kapasitas Daerah	0,62	11.773.632.310,00				0,62		Kepala pelaksana BPBD
2		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah		Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	78			78				Kepala pelaksana BPBD
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rata-rata tingkat capaian kinerja kegiatan pada program penunjang urusan pemerintahan daerah	100	3.925.935.675,00	100	100	100	100		Sekretaris
			Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase kecukupan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	2.601.114.808,00	25%	25%	25%	25%		Kasubag Umum dan Kepegawaian
			Penyediaan Gaji Dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	17	2.583.294.808,00	17	17	17	17	Laporan Bulanan dan Laporan Keuangan	
			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian /Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	200	17.820.000,00	25	25	25	25	Penerbitan SPM (Surat Perintah Membayar) OPD	
			Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase kecukupan layanan administrasi umum perkantoran	100%	497.467.419,00	25%	25%	25%	25%		Kasubag Umum dan Kepegawaian
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4	4.650.345,00	4	4	4	4	Belanja alat Listrik	
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5	208.773.415,00	5	5	5	5	Belanja ATK, bahan komputer, Sewa Kendaraan Dinas Operasional Pejabat Ess II	
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3	17.022.311,00	3	3	3	3	Belanja Barang pakai habis, perabot kantor, dan natura	

Program Penanggulangan Bencana	1. Persentase warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	100%	100%	100%	100%	100%	Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan
	2. Persentase warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana		70%	10%	20%		
	3. Persentase warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana		100%	100%	100%		
	4. Persentase penyelesaian dokumen pascabencana		70%	80%	100%		
Kegiatan Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Persentase Jumlah desa/ Kelurahan yang mendapatkan informasi rawan bencana		50%	50%	50%	500.000.000,00	Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan
Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/ Kota (perjenis Bencana)	Jumlah Orang yang Mendapatkan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/ Kota (Per Jenis Bencana)	874.378	874.378	874.378	874.378	500.000.000,00	
Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Persentase desa/ kelurahan di kawasan risiko tinggi yang mendapatkan layanan pencegahan dan kesiapsiagaan			40%	50%	1.112.533.140,00	Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan
Penguatan kapasitas kawasan untuk pencegahan dan kesiapsiagaan	Jumlah kawasan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	100%					
Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas			8	0	1.078.315.610,00	
Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/ Kota	Jumlah Warga Negara dan Aparatur yang Mengikuti Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana			1		6.212.670,00	
Kegiatan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Persentase jumlah korban yang terselamatkan dari dampak kejadian bencana				50	28.004.860,00	Kepala Bidang Kedarifan dan Logistik
		100%	100%	100%	100%	133.541.433,00	

Respon Cepat Farurat Bencana Kabupaten/ Kota	SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat	4	15.060.000,00	2	2		kegiatan penanganan bencana	
Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/ Kota	Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana	50	9.000.000,00	10	15	10	Kegiatan SAR	
Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/ Kota	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	50	98.313.933,00	10	15	10	Penyediaan Bahan Logistik kebencanaan	
Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	Jumlah Laporan Pelaksanaan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	2	11.167.500,00	1	1		Kegiatan aktivasi posko bencana	
Kegiatan Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Persentase penanggulangan bencana yang dilaksanakan sesuai SOP	100%	6.101.622.062,00	70%	75%	80%	100%	Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi
Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	Jumlah penyelesaian kegiatan pascabencana di semua sektor sesuai berdasarkan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kabupaten/ Kota yang dilegalikan	3	6.101.622.062,00	1		2	Penyusunan Dokumen Jitupasna, R3P dan Rehabilitasi jembatan Dawuhan	

Blitar, 31 Januari 2024

Kepala Pelaksana
Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Blitar



WONG BERTYANTO, ST. M. SI.
Kabupaten Tingkat I
Blitar 30518 1999011001